

per hari dan kualitas yang tidak keruh, berwarna, berbau, atau berbusa dihitung berdasarkan Jumlah Rumah Tangga Terlayani Air Minum Perpipaan / Jumlah Seluruh Rumah Tangga x 100%;

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan indikator untuk menentukan tercapainya atau tidaknya pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Suatu perangkat daerah dapat dikatakan berhasil pada suatu program atau kegiatan apabila nilai capaian kinerjanya memenuhi target yang telah ditentukan.

Indikator kinerja yang dianalisis diuraikan menjadi 4 (empat) Indikator kinerja yang memiliki target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Indikator Kinerja yang dimaksud yaitu Akses Air Minum Layak, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak, Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan, dan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

(Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	89,35%	86,82%	97,17%	Sangat Tinggi	Bidang Penyediaan Sarpras AMPLP
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	80,54%	85,5%	106,16%	Sangat Tinggi	Bidang Penyediaan Sarpras AMPLP
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	65,01%	65,74%	101,12%	Sangat Tinggi	Bidang PKP
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	34,00%	60,93%	179,21%	Sangat Tinggi	Bidang Penyediaan Sarpras AMPLP

Tabel diatas menunjukkan perbandingan Target dan Realisasi serta capaian per indikator kinerja tahun 2025. Sebagian besar Indikator Kinerja memiliki Capaian Kinerja yang sudah mencapai bahkan melebihi nilai 100%. Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak sebesar 106,15%. Keberhasilan capaian ini dikarenakan data realisasi yang didapat secara konkuren dari kabupaten/kota menunjukkan kenaikan persentase akses sanitasi layak pada jumlah KK (Kepala Keluarga) yang terlayani. Hal ini merepresentasikan cakupan pelayanan akses sistem air limbah ke rumah-rumah penduduk telah memenuhi target yang telah ditentukan;
2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan dengan capaian kinerja sebesar 101,12%. Keberhasilan capaian ini dikarenakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik telah banyak hunian/rumah yang telah memenuhi 4 kriteria sebagai hunian/rumah layak huni yaitu :
 1. Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m/kapita;
 2. Memiliki akses terhadap air minum layak;
 3. Memiliki akses terhadap sanitasi layak;
 4. Ketahanan bangunan yaitu atap terluas berupa beton/ganteng/seng/kayu/sirap, dinding terluas berupa marmer / granit / keramik / parket / vinil / karpet / ubin / tegel/ teraso / kayu / papan/ semen / bata merah.

Terdapat juga program bantuan stimulan perumahan swadaya BPS yang dikenal sebagai program bedah rumah, yang fokus memperbaiki RTLH agar memenuhi kriteria ketahanan bangunan dan sanitasi serta terdapat program 3 juta rumah untuk mempercepat penyediaan hunian bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah.

3. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan dengan capaian kinerja dengan capaian kinerja sebesar 179,21%. Keberhasilan capaian ini dikarenakan adanya kerjasama dengan PDAM dalam penyediaan jaringan perpipaan di wilayah perkotaan. Serta kecukupan sumber air baku, jaringan perpipaan yang

luas dan terpelihara, teknologi pengolahan yang sesuai, dan tingkat kebocoran air yang rendah.

Namun, masih terdapat Indikator Kinerja dengan besaran capaian masih dibawah 100%. Indikator kinerja tersebut yaitu :

1. Akses Air Minum Layak sebesar 97,17% belum mencapai target karena dampak dari penggunaan air yang bersumber dari air leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Dalam hal ini realisasi capaian pada tahun 2025 didapatkan secara konkuren dari kabupaten/kota yang menunjukkan hasil persentase cakupan akses air minum layak pada jumlah KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten/Kota yang terlayani. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Prov SumSel menunjukkan bahwa beberapa kabupaten masih memiliki capaian rendah dalam pengawasan sarana air minum, yang menyebabkan kualitas air yang sampai ke rumah tangga tidak selalu masuk kategori layak meski sumbernya ada.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	Indikator Lama								
1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	11,21%	11,40%	101,69%	-	-	-	Indikator Permendagri No. 18 Tahun 2020
		Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	34,02%	49,37%	145,12%	-	-	-	Indikator sesuai dengan Permendagri 18 tahun 2020 dan UU. No 23 tahun 2014
2	Terselenggaranya Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	82%	100%	121,95%	-	-	-	Indikator Permendagri No. 18 Tahun 2020
3	Meningkatnya Capaian Infrastruktur Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	88,35%	87,23%	98,73%	-	-	-	Indikator ini diganti menjadi indikator baru sesuai Permendagri No. 18 tahun 2020. Tapi indikator ini masih menjadi Indikator Kinerja Daerah atau IKD sehingga dalam perhitungan capaian menggunakan data dari BPS sebagai penanggung jawab dan DISPERKIM PROV SUMSEL sebagai pendukung dari indikator tersebut.
4	Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi Lingkungan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	80,62%	77,34%	95,93%	-	-	-	Indikator ini diganti menjadi indikator baru sesuai Permendagri No. 18 tahun 2020. Tapi indikator ini masih menjadi Indikator Kinerja Daerah atau IKD sehingga dalam perhitungan capaian menggunakan data dari BPS sebagai penanggung jawab dan DISPERKIM PROV SUMSEL sebagai pendukung dari indikator tersebut.
5	Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang Berstandar Teknis	Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani	31%	30,0%	96,77%	-	-	-	-

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	Indikator Baru								
1.	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	88,35%	87,23%	98,73%	89,35%	86,82%	97,17%	Perhitungan capaian menggunakan data dari BPS sebagai penanggung jawab dan DISPERKIM PROV SUMSEL sebagai pendukung dari indikator tersebut
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	80,62%	77,34%	95,93%	80,54%	85,5%	106,16%	Perhitungan capaian menggunakan data dari BPS sebagai penanggung jawab dan DISPERKIM PROV SUMSEL sebagai pendukung dari indikator tersebut
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	-	-	-	65,01%	65,74%	101,12%	Perhitungan capaian menggunakan data dari BPS sebagai penanggung jawab dan DISPERKIM PROV SUMSEL sebagai pendukung dari indikator tersebut
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	-	-	-	34,00%	60,93%	179,21%	Perhitungan capaian menggunakan data dari BPS sebagai penanggung jawab dan DISPERKIM PROV SUMSEL sebagai pendukung dari indikator tersebut

2. Perbandingan Realisasi serta Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3.1 Kinerja Akses Air Minum Layak Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 3.1, target Akses Air Minum Layak tahun 2025 adalah 89,35% dengan realisasi sebesar 86,82% sehingga capaian kinerja sebesar 97,17%.

Untuk tahun 2024 dan tahun 2025 perbandingan target kinerja Akses Air Minum

Layak dapat dilihat pada Grafik 3.2.



Grafik 3.2 Perbandingan Target Akses Air Minum Layak Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 3.2, target Akses Air Minum Layak tahun 2022 adalah 84,90%, tahun 2023 adalah 86,91%, tahun 2024 adalah 88,35% dan target tahun 2025 adalah 89,35%. Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak diganti menjadi indikator baru yaitu Akses Air Minum Layak sesuai Permendagri No. 18 tahun 2020. Adapun realisasinya dapat dilihat pada Grafik 3.3.



Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Akses Air Minum Layak Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 3.3, realisasi Akses Air Minum Layak tahun 2022 adalah 85,08%, tahun 2023 adalah 87,19%, tahun 2024 adalah 87,23% dan tahun 2025 adalah 86,82%. Dalam hal ini realisasi pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan kemudian pada tahun 2025 realisasinya mengalami penurunan di bandingkan dari tahun sebelumnya, karena bidang terkait tidak melakukan survei terhadap air minum layak. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan hanya mendata terkait infrastruktur. Data realisasi didapat dari Badan Pusat Statistik, yang mengukur indikator air minum layak adalah Dinas Kesehatan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah perlu ada pembahasan bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan terkait mekanisme perhitungan indikator Air Minum Layak. Adapun capaiannya dapat dilihat pada Grafik 3.4.



Grafik 3.4 Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 3.4, capaian Akses Air Minum Layak tahun 2022 adalah 100,21%, tahun 2023 adalah 100,32%, tahun 2024 adalah 98,73%, tahun 2025 adalah 97,17%. Dalam hal ini Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan, kemudian dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 mengalami penurunan. Penurunan capaian dikarenakan penurunan realisasi pada target di tahun 2025.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025 dapat dijabarkan pada uraian sebagai berikut:

- Pembangunan Sumur Bor Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang
- Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Lahat

- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Jua-Jua
- Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Distribusi dia. 160 mm dan dia. 90 mm Jl. Rimbe Tenan Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim

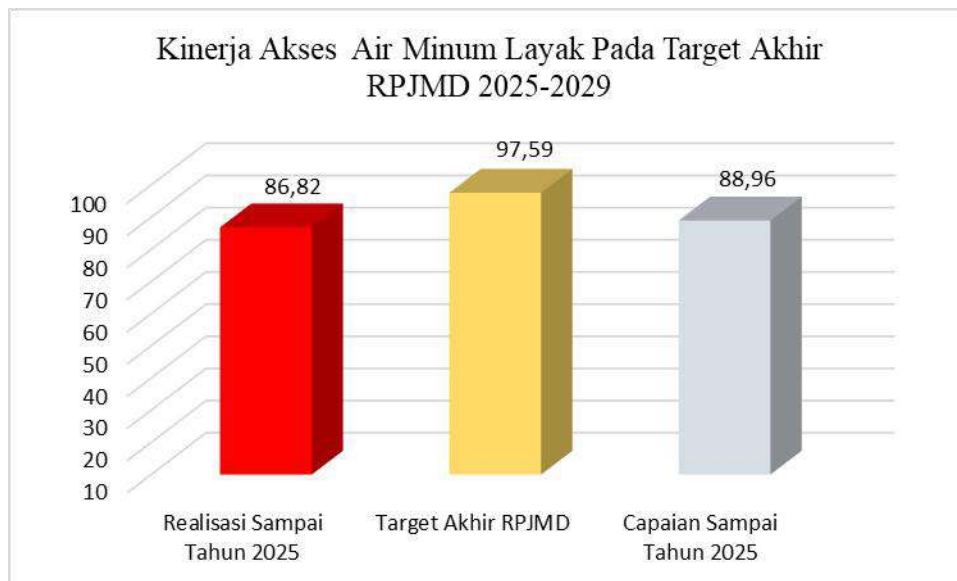
Gambar 3.1 merupakan beberapa gambar yang diambil dalam kegiatan Pembangunan Sumur Bor Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang dan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan penunjang Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2025.



Gambar 3.1 Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi Kel. Jua-Jua Kab. OKI

Gambar diatas menunjukkan progres Kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi Kel.Jua-Jua

Adapun target Akses Air Minum Layak pada akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 adalah sebesar 97,59%. Sampai tahun 2025 sudah 59 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan persentase realisasi fisik kegiatan masing-masing sebesar 100% sehingga cakupan akses air minum mencapai 86,82%. Artinya, persentase capaian pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 sejauh ini adalah sebesar 88,96%. Untuk lebih jelasnya, perbandingan antara target akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 terhadap realisasi sampai dengan sekarang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 3.5 Kondisi Kinerja Akses Air Minum Layak RPJMD 2025-2029 Provinsi Sumatera Selatan

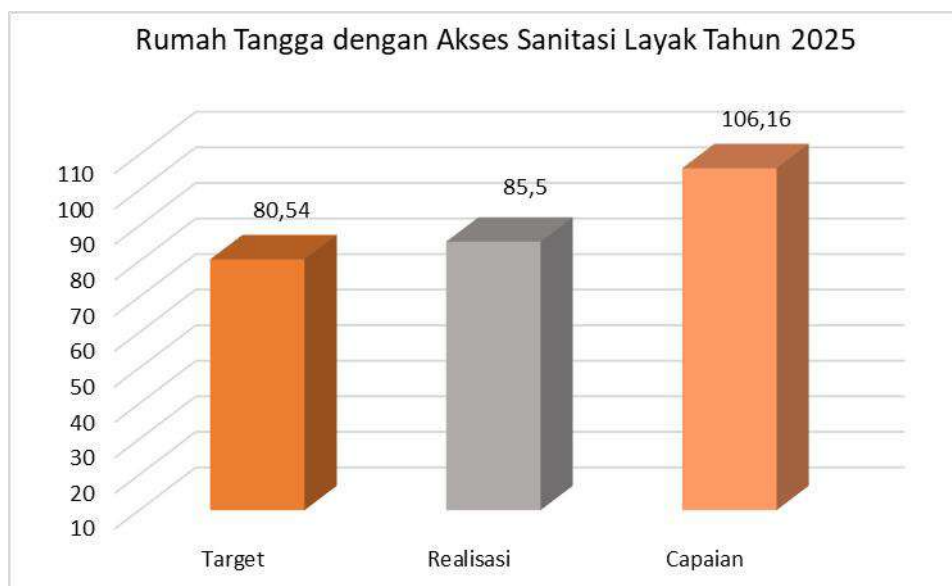
Grafik diatas menunjukkan kondisi kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak sekarang terhadap target kondisi kinerja akhir RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029. Untuk mencapai target kinerja di akhir periode RPJMD 2025-2029, perlu adanya analisis pemetaan kebutuhan air minum yang terbaru agar kegiatan penyediaan air minum di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan efisien.

Target nasional Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak pada tahun 2025 adalah sebesar 100% dimana target yang harus dipenuhi pada akhir periode RPJMN 2025-2045 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pusat telah menentukan kegiatan prioritas strategis berupa Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) dimana pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha (Sumber: RPJMN 2025-2045). Adapun kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung tercapainya target tersebut sampai tahun 2025 adalah sebesar 86,82% dengan rincian kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut grafik Target nasional Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak pada RPJMN 2025



Grafik 3.6 Capaian Akses Air Minum Layak Pada Target Nasional

Pada indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak target, realisasi dan capaian tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.7 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas dengan target 80,54%, maka realisasinya adalah 85,5% dengan capaian sebesar 106,16%.

Selanjutnya, untuk perbandingan target Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak tahun 2024 dan Akses Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak tahun 2025 dapat dilihat pada Grafik 3.8 dibawah.



Grafik 3.8 Perbandingan Target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 3.8 target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak tahun 2022 adalah 90,26%, tahun 2023 adalah 92,96%, tahun 2024 adalah 80,62% dan tahun 2025 adalah 80,54%. Dalam hal ini perbandingan target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dari tahun 2022 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan kemudian pada tahun 2023 sampai dengan 2025 mengalami penurunan. Penurunan target disebabkan perubahan indikator yang semula Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak diganti menjadi indikator baru yaitu Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak sesuai Permendagri No. 18 tahun 2020 Adapun realisasinya dapat dilihat pada Grafik 3.9



Grafik 3.9 Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 3.9 realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak pada tahun 2022 85,67%, tahun 2023 80,54%, tahun 2024 adalah 77,34%, tahun 2025 adalah 85,5%. Dalam Hal ini Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dari tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami penurunan, kemudian tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 85,5%. Hal ini merepresentasikan bahwa cakupan pelayanan akses sistem air limbah ke rumah-rumah penduduk telah memenuhi target yang telah ditentukan dan tiap rumah tangga sudah memiliki fasilitas buang air besar (BAB) yang digunakan secara pribadi atau bersama dengan rumah tangga tertentu (terbatas). Perhitungan capaian menggunakan data dari Badan Pusat Statistik sebagai penanggung jawab dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai pendukung dari indikator tersebut. Adapun capaiannya dapat dilihat pada Grafik 3.10

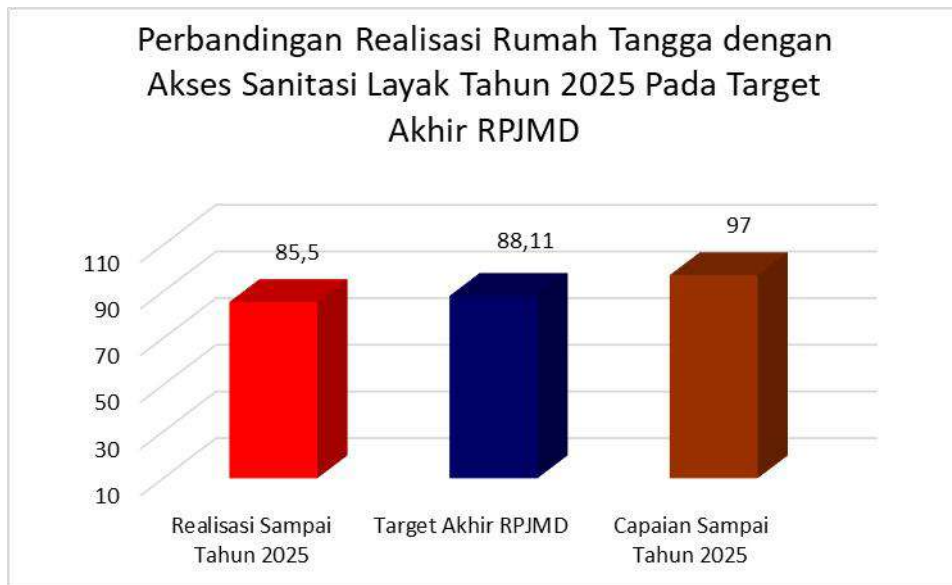


Grafik 3.10 Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 3.10 capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak tahun 2022 adalah 94,91%, tahun 2023 adalah 86,64%, tahun 2024 adalah 95,93%, tahun 2025 adalah 106,16%. Dalam Hal ini Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dari tahun 2022 sampai dengan 2023 mengalami penurunan, kemudian tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 106,16%.

Adapun target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak pada akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 adalah sebesar 88,11%. Sampai tahun 2025 sudah 1 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan persentase

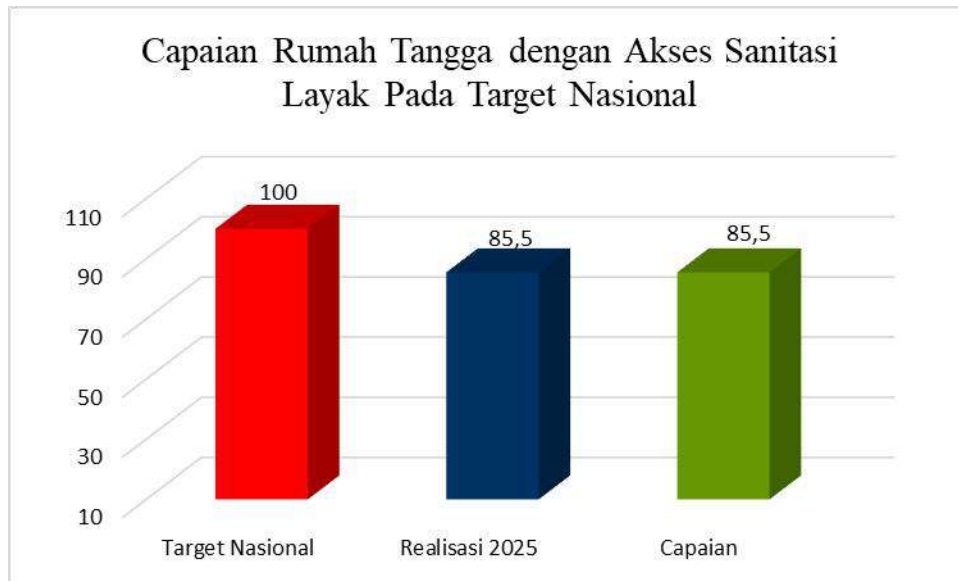
realisasi fisik kegiatan sebesar 100% sehingga realisasi rumah tangga dengan akses sanitasi layak mencapai 85,5%. Artinya, persentase capaian pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 sejauh ini adalah sebesar 95%. Untuk lebih jelasnya, perbandingan antara target akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 terhadap realisasi sampai dengan sekarang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 3.11 Perbandingan Realisasi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2025 Pada Target Akhir RPJMD

Grafik diatas menunjukkan kondisi kinerja Indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak sekarang terhadap target kondisi kinerja akhir RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029. Untuk mencapai target akhir periode RPJMD 2025-2029, perlu ditingkatkan kegiatan penyelenggaraan akses sanitasi layak baik secara kuantitas dan kualitas kedepannya.

Target nasional Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak adalah sebesar 100%. Proyek prioritas strategis yang diselenggarakan pemerintah pusat untuk mencapai target tersebut adalah Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (100% Rumah Tangga). Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat (Sumber: RPJMN 2025-2045). Adapun kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung proyek prioritas strategis tersebut yaitu sebesar 85,5% sampai tahun 2025 dengan rincian kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Grafik target nasional Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dapat dilihat sebagai berikut.



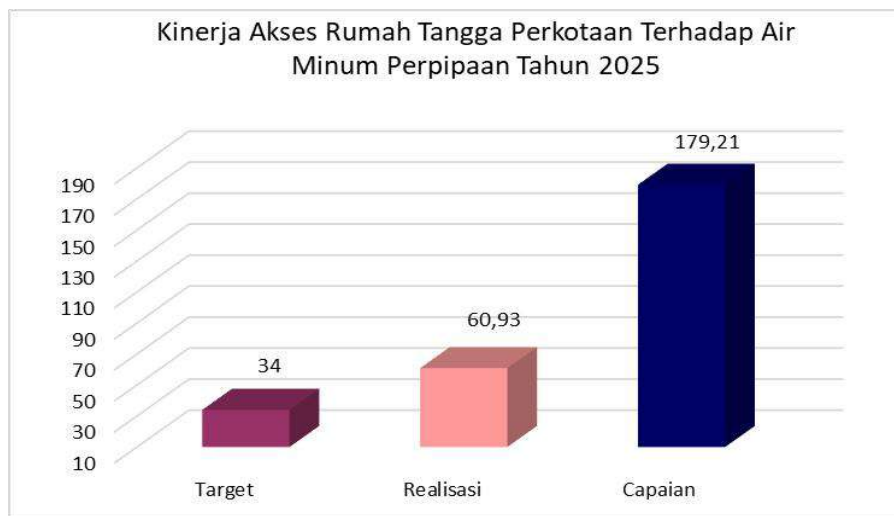
Grafik 3.12 Capaian Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Pada Target Nasional

Berikut ini merupakan beberapa gambar yang diambil pada Kegiatan Pembangunan Drainase Kota Muara Dua Kab. Oku Selatan sebagai kegiatan yang menunjang peningkatan Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di tahun 2024.



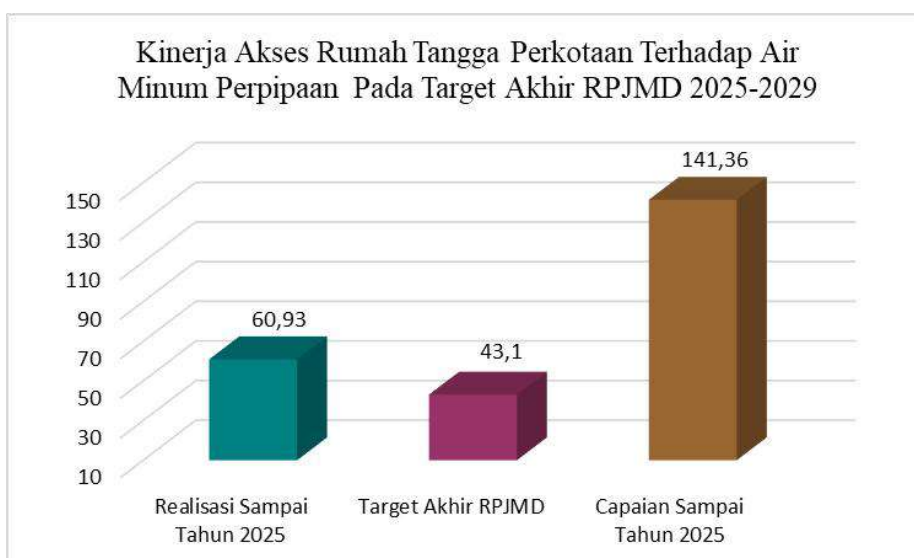
Gambar 3.2 Dokumentasi kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi Sekayu dan Sekitarnya

Kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaan pada tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.13 Kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan Tahun 2025

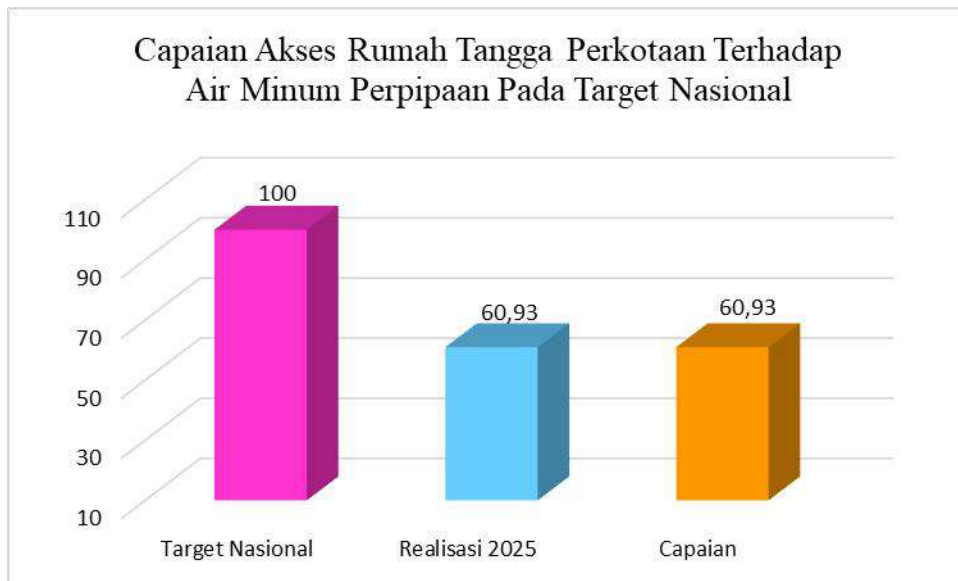
Berdasarkan grafik tersebut, target Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaan pada tahun 2025 sebesar 34% dan realisasi sebesar 60,93% serta capaian sebesar 79,21%. Adapun target indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaan pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 karena indikator tersebut merupakan indikator baru sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 Untuk kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaan pada akhir periode RPJMD dapat dilihat sebagai berikut.



Grafik 3.14 Kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan Tahun 2025 Pada Target Akhir RPJMD 2025-2029

Berdasarkan grafik tersebut, realisasi sampai tahun 2025 sebesar 60,93% dengan target akhir RPJMD 2029 sebesar 43,1% telah mencapai target akhir RPJMD dengan adanya program/kegiatan yang menunjang indikator tersebut. Sehingga didapat capaian sampai tahun 2025 sebesar 141,36%.

Target nasional Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan adalah 100% dengan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 60,93% sehingga capaian pada standar nasional sebesar 60,93%. Grafik Capaian Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan pada standar nasional dapat dilihat sebagai berikut :



Grafik 3.15 Capaian Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaan Pada Target Nasional

Dokumentasi kegiatan indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaan dapat dilihat sebagai berikut



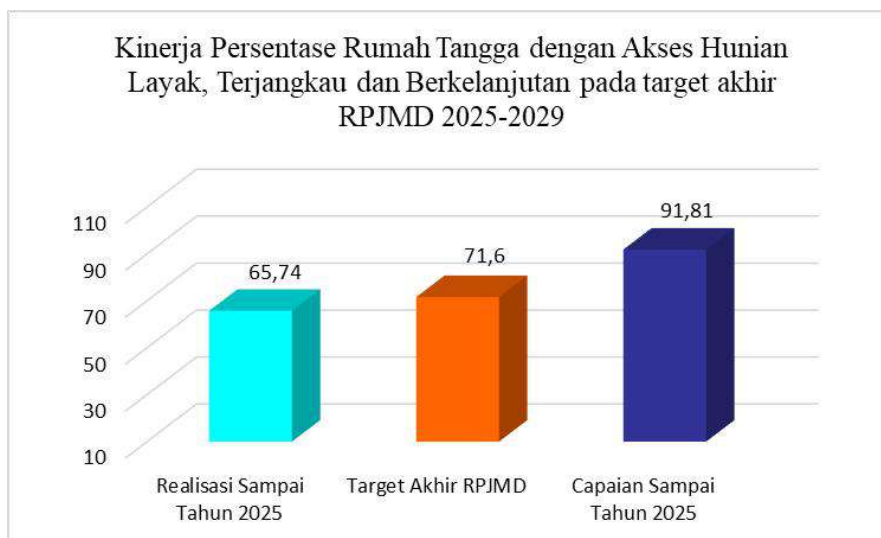
Gambar 3.3 Dokumentasi kegiatan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Lahat

Kinerja indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.16 Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, Target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan tahun 2025 sebesar 65,01% dengan realisasi sebesar 65,74 dan capaian sebesar 101,12%. Adapun target indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 karena indikator tersebut merupakan indikator baru sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025. Untuk kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan pada target akhir RPJMD 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut.



Grafik 3.17 Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Pada Akhir RPJMD 2025-2029

Berdasarkan grafik tersebut, realisasi sampai tahun 2025 sebesar 65,74% dengan target akhir RPJMD 2029 sebesar 71,6% dan capaian sampai tahun 2025 sebesar 91,81%.

Target nasional Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan adalah 67% dengan realisasi tahun 2025 sebesar 65,74% sehingga capaian yang didapat adalah 98,12%. Grafik capaian kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan dapat dilihat sebagai berikut:



Berikut dokumentasi kegiatan Gerak Cepat Rumah Tidak Layak Huni melalui CSR oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Gerak Cepat Rumah Tidak Layak Huni melalui CSR oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Untuk Indikator Kinerja Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani, pada tahun 2025, indikator tersebut tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama. Indikator tersebut berubah menjadi IKK dengan Indikator yang berbeda. Adapun capaian Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.19 Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani Tahun 2024

Adapun target untuk indikator Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani pada tahun 2024 adalah 31%.

Kinerja Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

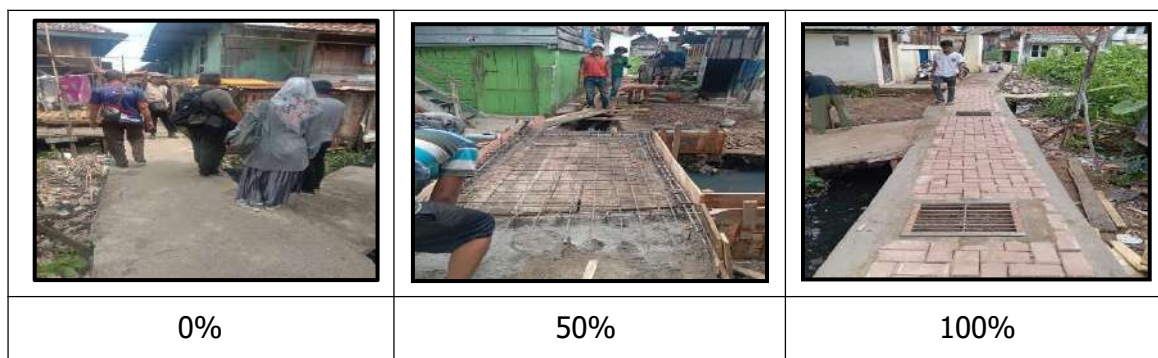


Grafik 3.20 Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas, Realisasi Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani sebesar 11,40%. Adapun target untuk indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani pada tahun 2024 adalah 11,21%. Sehingga capaian adalah 101,69%. Pada tahun 2025, indikator tersebut tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama. Melainkan menjadi Indikator Kinerja Kunci. Sehingga tahun 2025 indikator tersebut tidak lagi dimasukkan dalam LKjIP.

Adapun kegiatan yang mendukung indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani yaitu Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha. Keberhasilan ini juga karena kegiatan berjalan sesuai dengan titik lokasi yang tercantum di SK Kumuh Kabupaten/Kota dan telah dilakukannya kerjasama CSR terkait pemenuhan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar dibawah adalah dokumentasi kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Jalan Lingkungan dan Drainase Permukiman Kumuh Kel. 29 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang :



Gambar 3.5 Foto Kegiatan indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani

Selanjutnya kinerja Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.21 Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni pada Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, target untuk indikator Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni pada tahun 2024 adalah 82%. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 100% dengan capaian sebesar 121,95%. Pada tahun 2025, indikator tersebut tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama. Melainkan menjadi Indikator Kinerja Kunci. Sehingga tahun 2025 indikator tersebut tidak lagi dimasukkan dalam LKjIP.

Selanjutnya untuk indikator Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.22 Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa target Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU Tahun 2024 sebesar 34,02% dengan realisasi sebesar 49,37% serta capaian sebesar 145,12%. Pada tahun 2025, indikator tersebut tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama. Melainkan menjadi Indikator Kinerja Kunci. Sehingga tahun 2025 indikator tersebut tidak lagi dimasukkan dalam LKjIP

Dokumentasi kegiatan untuk indikator Persentase Satuan Permukiman Yang Sudah Dilengkapi PSU dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar dibawah adalah dokumentasi kegiatan Penyediaan PSU Permukiman Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir :



Gambar 3.6 Foto Kegiatan indikator Persentase Satuan Permukiman Yang Sudah Dilengkapi PSU

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2030

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama 1 tahun terakhir masa Renstra ditunjukkan pada Tabel 3.4 yang merupakan kemajuan capaian sasaran strategis.

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
1	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	97,17%	100%	97,17
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	106,16%	90%	117,96
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	101,12%	72,6%	139,28
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	179,21%	43,20%	414,84

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Salah satu komponen analisis capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja instansi adalah membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan standar nasional. Adapun data perbandingan yang disajikan adalah perbandingan capaian kinerja dari Pemerintah Pusat terhadap kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

Sumatera Selatan. Penyandingan realisasi kinerja tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6 = 4/5 \times 100$
1	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	86,82%	100%	86,82%
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	85,5%	100%	85,50%
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	65,74%	67%	98,12%
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	60,93%	100%	60,93%

Berdasarkan tabel data diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase capaian Akses Air Minum Layak masih dibawah target nasional hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, keterbatasan ketersediaan sumber air baku yang memenuhi standar kualitas, terutama pada wilayah tertentu yang mengalami tekanan terhadap sumber daya air. Kedua, belum optimalnya infrastruktur penyediaan air minum, baik melalui jaringan perpipaan maupun non-perpipaan, sehingga belum mampu menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Ketiga, masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan air minum yang memenuhi standar kesehatan.
2. Persentase capaian rumah tangga dengan akses sanitasi layak masih dibawah target nasional dikarenakan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi layak dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kedua, keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat menyebabkan belum optimalnya pembangunan sarana sanitasi mandiri seperti jamban sehat. Ketiga, belum meratanya infrastruktur pendukung sanitasi, termasuk sistem pengelolaan air limbah domestik yang memadai;
3. Realisasi indikator akses hunian layak pada tahun 2025 ini tercatat sebesar 65,74 %, sehingga terdapat gap sebesar 1.26 % terhadap target nasional. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya intervensi melalui program stimulan, capaian ini menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan hunian layak di wilayah provinsi masih memerlukan akselerasi yang lebih masif untuk mengejar ketertinggalan terhadap pemenuhan hunian layak di tingkat nasional.
4. Realisasi akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan pada tahun 2025 tercatat sebesar 60.93 %. Angka ini menunjukkan adanya selisih (gap) sebesar 39.07 %

dari Target Nasional yang telah ditetapkan dalam roadmap Universal Access. Meskipun terdapat pertumbuhan jumlah sambungan rumah (SR) baru secara absolut, namun secara persentase, laju penyediaan layanan belum mampu mengimbangi pesatnya pertumbuhan populasi di kawasan perkotaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Alternative Solusi

Analisis penyebab keberhasilan kinerja pada tahun 2024 dibagi menjadi empat indikator kinerja yang memiliki nilai kinerja indikator 100% atau keatas. Empat indikator kinerja tersebut adalah Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani, Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU, Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak.

Adapun analisis penyebab kegagalan kinerja pada tahun 2024 dibagi menjadi dua indikator kinerja yang memiliki nilai kinerja dibawah 100%. Dua indikator kinerja tersebut adalah Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak dan Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani.

Penyebab keberhasilan dan kegagalan serta solusi pada indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini

Tabel 3.6 Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	89,35%	86,82%	97,17%	Realisasi pada indikator belum mencapai target karena dampak dari penggunaan air yang bersumber dari air leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Dalam hal ini realisasi capaian pada tahun 2025 didapatkan secara konkuren dari kabupaten/kota yang menunjukkan hasil persentase cakupan akses air minum layak pada jumlah KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten/Kota yang terlayani. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Prov SumSel menunjukkan bahwa beberapa kabupaten masih memiliki capaian rendah dalam pengawasan sarana air minum, yang menyebabkan kualitas air yang sampai ke rumah tangga tidak selalu masuk kategori layak meski sumbernya ada. Hal lainnya yang menyebabkan belum tercapainya target indikator dikarenakan Belum optimalnya performa manajemen operasional di tingkat pengelola (PDAM/EUMD Air Minum) yang berada di Kabupaten/Kota, serta di beberapa wilayah, masyarakat masih enggan beralih ke layanan air minum layak (perpipaan) dan lebih memilih menggunakan air tanah dangkal yang secara kualitas belum tentu terjamin keamanannya.	Perlu ada pembahasan bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan. Dalam rangka meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan bimbingan teknis serta diskusi untuk membantu dan mendorong EUMD Air Minum dalam melakukan perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja Perusahaan menuju Berkinerja SEHAT guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat 18 Perusahaan Air Minum/UPTD
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	80,54%	85,5%	106,16%	Realisasi pada indikator telah mencapai target karena data realisasi yang didapat secara konkuren dari kabupaten/kota menunjukkan kenaikan persentase akses sanitasi layak pada jumlah KK (Kepala Keluarga) yang terlayani. Hal ini merepresentasikan cakupan pelayanan akses sistem air limbah ke rumah-rumah penduduk telah memenuhi target yang telah ditentukan. hal lain yang menjadi faktor keberhasilan indikator adalah peran aktif diantara stakeholder baik pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam dukungan pendanaan bidang sanitasi.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan akan terus melakukan pembangunan dan menyelenggarakan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman. Program ini berfungsi sebagai peta jalan untuk menasikkan pembangunan infrastruktur sanitasi di setiap kabupaten/kota terukur dan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kota dalam rangka pemenuhan target indikator diantaranya : - Program PPMU PCSP (Provincial Project Management Unit Palembang City Sewerage Project) guna membangun Membangun sistem sanitasi modern di Palembang; pengolahan limbah, sambungan rumah, dan pengurangan pencemaran air serta peningkatan kesehatan Masyarakat. - Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman , sebanyak 2 (dua) Kabupaten yang mendapat pendampingan Implementasi SSK yaitu Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten OKU Selatan, - Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) Sumatera Selatan dilaksanakan untuk mengetahui isu strategis dan permasalahan sanitasi eksisting dan menentukan arah kebijakan dan strategi pengembangan ke dalam program kegiatan dan rencana aksi serta indikasi pembiayaannya.
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	65,01%	65,74%	101,12%	Realisasi pada indikator telah mencapai target karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik telah banyak hunian/rumah yang telah memenuhi 4 kriteria sebagai hunian layak huni yaitu : 1. Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m/kapita; 2. Memiliki akses terhadap air minum layak; 3. Memiliki akses terhadap sanitasi layak; 4. Ketahanan bangunan yaitu atap terbuat berupa beton/ganteng/seng/kayu/sirap, dinding terluas berupa marmer/granit/keramik/parket/vinil/karpet/ubin/teg el/teras/kayu/papan/semen/bata merah. Terdapat juga program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS yang dikenal sebagai program bedah rumah, yang fokus memperbaiki RTLH agar memenuhi kriteria ketahanan bangunan dan sanitasi serta terdapat program 3 juta rumah untuk mempercepat penyediaan hunian bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan akan tetap melaksanakan program bedah rumah untuk meningkat kualitas RTLH, penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan melakukan penyediaan infrastruktur dasar serta melaksanakan kerjasama dengan CSR.
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	34,00%	60,93%	179,21%	Realisasi pada indikator telah mencapai target karena adanya kerjasama dengan PDAM dalam penyediaan jaringan perpipaan di wilayah perkotaan. Serta kecukupan sumber air baku, jaringan perpipaan yang luas dan terpelihara, teknologi pengolahan yang sesuai, dan tingkat kebocoran air yang rendah.	Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme PDAM dalam tata kelola layanan air, memperluas jaringan perpipaan ke kawasan perkotaan yang belum terlayani serta menurunkan tingkat kebocoran air untuk meningkatkan efisiensi distribusi.

Selain keberhasilan dan kegagalan pada indikator, terdapat juga analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	86,82%	Untuk data capaian, bekerja sama dengan BPS sebagai penanggung jawab. Sedangkan DISPERKIM Prov. SumSel hanya sebagai pendukung	-	97,17%	Menunjang
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	85,5%	Untuk data capaian, bekerja sama dengan BPS sebagai penanggung jawab. Sedangkan DISPERKIM Prov. SumSel hanya sebagai pendukung	-	106,16%	Menunjang
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	65,74%	Untuk data capaian, bekerja sama dengan BPS sebagai penanggung jawab. Sedangkan DISPERKIM Prov. SumSel hanya sebagai pendukung	-	101,12%	Menunjang
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	60,93%	Untuk data capaian, bekerja sama dengan BPS sebagai penanggung jawab. Sedangkan DISPERKIM Prov. SumSel hanya sebagai pendukung	-	179,21%	Menunjang

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya sangat berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana. Perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran berdasarkan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 3.8

Tabel 3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Indikator Kinerja					Anggaran			
No.	Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	89,35%	86,82%	97,17%	Rp 871.350.350	Rp 674.199.297	77,37	22,63
		80,54%	85,5%	106,16%	Rp 2.084.232.217	Rp 845.044.217	40,54	59,46
		65,01%	65,74%	101,12%	Rp 16.730.644.158	Rp 15.599.821.041	93,24	6,76
		34,00%	60,93%	179,21%	Rp 871.350.350	Rp 674.199.297	77,37	22,63

Untuk pencapaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.9

Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja					Anggaran			
No.	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	100%	Rp 28.668.082.852	Rp 24.715.611.484	86,21	13,79
2	Program Pengembangan Perumahan	83,97%	100%	119,09%	Rp 2.650.528.904	Rp 264.641.322	9,98	90,02
		83,09%	100%	120,35%				
3	Program Kawasan Permukiman	12,4%	14,21%	114,60%	Rp 16.730.644.158	Rp 15.599.821.041	93,24	6,76
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	49,54%	40,24%	81,23%	Rp 52.111.979.725	Rp 46.387.331.502	89,01	10,99
5	Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	21,86%	21,96%	100%	Rp 119.947.840	Rp 115.499.972	96,29	3,71
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	89,35%	86,82%	97,17%	Rp 871.350.350	Rp 674.199.297	77,37	22,63
		1,6%	1,5%	93,75%				
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	80,54%	85,50%	106,16%	Rp 400.000.000	Rp 341.644.894	85,41	14,59
		8%	4,33%	54,13%				
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	-	-	-	Rp 42.845.800	Rp 42.845.800	100,00	0,00

Indikator Kinerja					Anggaran			
No.	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
9	Program Pengembangan Permukiman	78,98%	78,68%	99,62%	Rp 8.162.115.022	Rp 5.352.215.583	65,57	34,43
10	Program Penataan Bangunan Gedung	41,43%	58,57%	141,37%	Rp 1.097.833.565	Rp 957.624.306	87,23	12,77
11	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	31%	31%	100,00%	Rp 2.287.656.039	Rp 964.626.767	42,17	57,83
12	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	67%	87,00%	129,85%	Rp 3.762.104.072	Rp 3.440.126.824	91,44	8,56

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka terselenggaranya program yang mendukung indikator kinerja dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efisiensi Penggunaan Sumber Daya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Adapun persentase efisiensi biaya program yang mendukung indikator kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.10

Tabel 3.10 Persentase Efisiensi Biaya Program yang Mendukung Indikator Kinerja Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 28.668.082.852	Rp 24.715.611.484	86,21
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp 2.650.528.904	Rp 264.641.322	9,98
3	Program Kawasan Permukiman	Rp 16.730.644.158	Rp 15.599.821.041	93,24
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Rp 52.111.979.725	Rp 46.387.331.502	89,01
5	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rp 119.947.840	Rp 115.499.972	96,29
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 871.350.350	Rp 674.199.297	77,37
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 400.000.000	Rp 341.644.894	85,41
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 42.845.800	Rp 42.845.800	100,00
9	Program Pengembangan Permukiman	Rp 8.162.115.022	Rp 5.352.215.583	65,57
10	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 1.097.833.565	Rp 957.624.306	87,23
11	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp 2.287.656.039	Rp 964.626.767	42,17
12	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 3.762.104.072	Rp 3.440.126.824	91,44

Berdasarkan Tabel 3.10 realisasi biaya untuk keseluruhan program pada tahun 2024 sebesar Rp. 112.140.978.783,- adapun target biaya adalah Rp. 121.418.895.865,-. Dengan rumus efisiensi diatas, didapat efisiensi keseluruhan program pada tahun 2024 sebesar 8,40%. Persentase efisiensi ini tergolong sedang sehingga bisa diasumsikan secara umum penggunaan sumber daya biaya dapat terefisiensi cukup baik.

Adapun dilihat dari level setiap program, program yang memiliki efisiensi sumber daya paling besar adalah Program Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan efisiensi sebesar 15,13%. Hal ini dikarenakan program tersebut dimunculkan untuk menunjang kegiatan penataan bangunan dan lingkungan. Adapun untuk program-program lainnya, efisiensi dapat dilakukan melalui pelibatan multipihak dalam pelaksanaan kegiatan seperti pelibatan pihak ke-3, kerja sama dengan perguruan tinggi, instansi vertikal, pihak swasta atau lembaga terkait dalam penggunaan tenaga ahli, tim penilai, narasumber serta dalam pembantuan pelaksanaan kegiatan. Efisiensi juga dilakukan dengan penggunaan sarana dan prasarana penunjang kerja secukupnya.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2024 adalah sebanyak 12 Program dan 25 Kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini:

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 871.350.350,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 674.199.297,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 77,37% yang diarahkan untuk menerapkan lingkungan yang sehat pada permukiman di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 18 lembaga, Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun sebanyak 1 dokumen, Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebanyak 17 kabupaten/kota

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 341.644.894,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 67,15%, yang diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai

adalah Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun sebanyak 2 dokumen, Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebanyak 17 kabupaten/kota.

3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 42.845.800,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 42.845.800,-,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%. Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi sebanyak 2 dokumen; Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun sebanyak 1 sistem drainase.

4) Program Penataan Bangunan Gedung

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.097.833.565,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 957.624.400,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 87,23%, yang diarahkan untuk menata bangunan gedung dan aset di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat sebanyak 10 peserta; Jumlah Rumah Negara yang Dikelola sebanyak 10 rumah negara; Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang sebanyak 10 lisensi; Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebanyak 17 kabupaten/kota.

5) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.287.656.039,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 964.626.767,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 42,17%, yang diarahkan untuk menata bangunan dan lingkungan strategis dan aset provinsi di Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata sebanyak 1 kawasan, Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun sebanyak 1 dokumen, Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan sebanyak 1 dokumen, Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan sebanyak 17

kabupaten/kota.

6) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.762.104.072,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.440.126.824,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,44%, yang diarahkan untuk mengembangkan jasa konstruksi di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan sebanyak 1 dokumen; Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih sebanyak 140 orang; Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 44 lembaga; Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi sebanyak 100 orang; Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya sebanyak 20 orang; Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya sebanyak 2 lembaga; Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan sebanyak 1 layanan informasi, Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan sebanyak 1 perangkat pendukung; Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan sebanyak 1 dokumen, Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 17 orang; Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha sebanyak 2 badan usaha; Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun sebanyak 2 dokumen.

7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 28.668.082.852,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 24.715.611.484,- dengan realisasi fisik sebesar 99,01% dan realisasi keuangan sebesar 86,21%, yang diarahkan untuk administrasi perkantoran dalam mendukung terselenggaranya urusan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sebanyak 2 dokumen; Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah DPA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah perubahan DPA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dikoordinasi dan

disusun sebanyak 2 laporan; Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 1 laporan; Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan sebanyak 115 orang; Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan sebanyak 1 dokumen; Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan sebanyak 1 dokumen; Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan, Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan sebanyak 1 dokumen, Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 1 laporan, Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan sebanyak 1 paket, Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 1 dokumen, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 6 orang, Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan sebanyak 30 orang, Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket, Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket, Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 paket, Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan sebanyak 1 dokumen, Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 1 laporan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 1 laporan, Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebanyak 1 dokumen, Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan sebanyak 2 unit sarpras Gedung, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 1 laporan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 1 laporan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 1 laporan, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 22 unit roda empat dan 3 unit roda 2, Jumlah Mebel yang Dipelihara sebanyak 1 unit, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit, Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan sebanyak 1 unit kerja.

8) Program Pengembangan Perumahan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.650.528.904,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 264.641.322,- dengan realisasi fisik sebesar 10,34% dan realisasi keuangan sebesar 9,98%, yang diarahkan untuk melaksanakan wajib pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani sebanyak 1 dokumen, Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah sebanyak 1 dokumen, Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana sebanyak 15 orang, Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih sebanyak 2 orang, Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan sebanyak 34 orang.

9) Program Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 16.730.644.158,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 15.599.821.041,- dengan realisasi fisik sebesar 99,20% dan realisasi keuangan sebesar 93,24%, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dan utilitas umum di kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi sebanyak 6 dokumen, Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara sebanyak 1 sistem informasi, Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina sebanyak 7 kelompok, Jumlah Rumah Tangga Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah sebanyak 10 rumah tangga, Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebanyak 1 laporan, Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh sebanyak 100 orang, Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah sebanyak 10 rumah tangga, Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

sebanyak 1 laporan, Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha sebanyak 1 laporan, Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) sebanyak 1 dokumen, Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan seluas 1 Ha, Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar seluas 1628,58 Ha

10) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 52.111.979.725,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 46.387.311.502,- dengan realisasi fisik sebesar 97,44% dan realisasi keuangan sebesar 89,01%, yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan PSU di kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman sebanyak 1 dokumen, Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman sebanyak 20 lokasi, Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman sebanyak 1 laporan.

11) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 119.947.840,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 115.499.972,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,29%. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah sebanyak 1 laporan.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Anggaran terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Pagu anggaran dan realisasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target di Triwulan ini	Realisasi Triwulan ini	Target Triwulan ini	Realisasi Triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Belanja	118.589.320.545	99.914.072.908	100	84,25	100	95.05
Belanja Operasi	111.823.712.236	95.207.134.244	100	85,14	-	-
Belanja Modal	6.765.608.309	4.706.938.664	100	69,57	-	-
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-
Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.11 menunjukkan Realisasi Keuangan Belanja Operasi untuk tahun 2025 sebesar 85,14%. Realisasi keuangan belanja operasi tidak mencapai 100% karena disebabkan oleh keterlambatan proses lelang. Untuk Belanja Modal, Realisasi Keuangannya sebesar 69,57%. Adapun untuk realisasi fisik belum mencapai 100% dikarenakan terdapat program/kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Program Pengembangan Perumahan, habisnya kontrak pada tanggal 22 Desember 2025 pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sehingga pengajuan pembayaran menjadi hutang serta beberapa kegiatan di Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terkendala dalam proses pencairan GU yang jumlahnya tidak menyukupi atas beban kebutuhan. Jadi, Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebesar 84,25% dengan Realisasi Fisik sebesar 95,05%.

Uraian rinci mengenai realisasi pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Total Belanja

Realisasi keuangan Total Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 99.914.072.908,- atau 84,25% dan realisasi fisik 95,05%

2. Realisasi Belanja Operasi

Realisasi keuangan Belanja Operasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 95.207.134.244,-.

3. Realisasi Belanja Modal

Realisasi keuangan Belanja Modal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4.706.938.664,-.

Adapun realisasi keuangan program/kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12 Realisasi Keuangan Program/Kegiatan APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Pagu Anggaran	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	1.1 Meningkatkan Akses Pelayanan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	871.350.350	77,37	674.199.297
			Program Pengembangan Permukiman	8.162.115.022	65,57	5.352.215.583
		1.2 Meningkatkan Akses Pelayanan Sanitasi	Program Pengembangan Permukiman			
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.084.232.217	67,15	1.399.529.010
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	42.845.800	100,00	42.845.800
	Meningkatnya Kualitas Kawasan serta Bangunan gedung dan Rumah	1.3	Program Pengembangan Perumahan	2.650.528.904	9,98	264.641.322
			Program Kawasan Permukiman	16.730.644.158	93,24	15.599.821.041
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	52.111.979.725	89,01	46.387.331.502
			Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	119.947.840	96,29	115.499.972
			Program Penataan Bangunan Gedung	1.097.833.565	87,23	957.624.306
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2.287.656.039	42,17	964.626.767
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3.762.104.072	91,44	3.440.126.824
		1.4 Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.668.082.852	86,21	24.715.611.484